

# ANALISIS KEBIJAKAN GURU: KEBIJAKAN P3K DAN GURU PENGGERAK

### Eva Qomariyah<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia evaqomariyah 1@gmail.com<sup>1</sup>

### Masduki Duryat<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia masdukiduryat@syekhnurjati.ac.id<sup>2</sup>

Abstrak: Tulisan ini membahas tiga aspek utama dalam kebijakan pendidikan di Indonesia: analisis kebijakan pendidikan, kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kebijakan Guru Penggerak. Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses intelektual dan praktis yang berfokus pada penciptaan, penilaian kritis, dan komunikasi pengetahuan terkait kebijakan pendidikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik serta berfungsi sebagai fasilitator, pengolah, dan perencana Pendidikan. Kebijakan PPPK bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan menaikkan standar gaji dan memberikan status pekerjaan yang lebih terjamin. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kekurangan tenaga didik di sekolah swasta akibat perpindahan guru ke sekolah negeri. Program Guru Penggerak dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berfokus pada pembelajaran abad ke-21 dan pendidikan pancasila. Guru Penggerak diharapkan menjadi agen perubahan dalam pendidikan, mempromosikan inovasi, kreativitas. ekosistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melalui analisis kebijakan pendidikan, kebijakan PPPK, dan program Guru Penggerak, tulisan ini menyoroti pentingnya peran guru dalam pendidikan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Guru PPPK, Guru Penggerak

Received: 19-02-2024 Revised: 16-04-2024 Accepted: 10-06-2024

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam proses pembangunan bangsa karena berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, guru menempati posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan sekaligus agen perubahan di lapangan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata menjadi suatu keniscayaan. Analisis kebijakan pendidikan menjadi kerangka penting untuk memahami dinamika kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, penyusunan alternatif solusi, hingga penyampaian rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kebijakan. Menurut Dunn (2003), analisis kebijakan bukan hanya aktivitas akademik, tetapi juga praktis karena bertujuan untuk menciptakan dan mengomunikasikan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam bidang pendidikan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pendidikan di era modern, profesionalisme guru menjadi perhatian utama dalam berbagai kebijakan nasional. Peran guru tidak hanya terbatas pada kegiatan mengajar di kelas, melainkan juga mencakup pembinaan karakter, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial. Guru harus mampu menjalankan peran sebagai fasilitator, pembimbing, dan inovator dalam proses pembelajaran yang dinamis dan kontekstual. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mengatur tugas dan fungsi guru, tetapi juga memberikan penguatan terhadap kesejahteraan, kompetensi, dan pengembangan karier mereka secara berkelanjutan.

Salah satu kebijakan penting dalam mendukung kesejahteraan guru adalah program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program ini dirancang untuk memberikan kepastian status dan peningkatan pendapatan bagi guru honorer yang selama ini mengalami ketidakpastian dalam pengangkatan dan penggajian. Dengan adanya kebijakan PPPK, diharapkan kualitas hidup dan kinerja guru dapat meningkat, sehingga berdampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. <sup>3</sup> Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eko Suhendro, Muhammad Nurul Mubin, and Anita Saharani, "Evaluating the Impact of Professional Development on STEAM Education Competency in the Industrial Revolution 5.0 Era," *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 9, no. 1` (March 31, 2024): 72–81, https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/8305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 5th ed. (Boston: Pearson Education, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Salsa Warda. Utami, Sherin Dwi. Utami, Lutfi Wahyu. Setiawan, Farid. Lestari, "TERSEJAHTERANYA GURU HONORERDENGAN ADANYA KEBIJAKAN P<sub>3</sub>K," *YASIN*; *Jurnal Pendidikan dan sosial budaya* 3, no. 4 (2023): 689–690.

menghadirkan tantangan, terutama bagi sekolah swasta yang harus kehilangan tenaga pendidik berkualitas akibat migrasi guru ke sekolah negeri. Hal ini menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Di sisi lain, program Guru Penggerak hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara sistematis. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program ini bertujuan mencetak guru yang memiliki kepemimpinan pembelajaran, mampu berinovasi, serta menjadi teladan dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan karakter peserta didik. Guru Penggerak diharapkan menjadi motor penggerak transformasi pendidikan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai tiga aspek utama dalam kebijakan pendidikan, yaitu analisis kebijakan, kebijakan PPPK, dan program Guru Penggerak, dengan menyoroti tantangan implementatif, peluang penguatan, serta kontribusinya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan program Guru Penggerak. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen berupa jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada interpretasi kritis terhadap isi kebijakan, pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementatif di lapangan.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji substansi dokumen dan literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, mobilitas tenaga pengajar, serta transformasi peran guru sebagai agen perubahan. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan analisis komparatif terhadap berbagai dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemetaan konseptual kebijakan PPPK dan Guru Penggerak, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kebijakan yang sedang berjalan serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

#### **PEMBAHASAN**

## Analisis Kebijakan

Menurut Dunn dalam <sup>4</sup>, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan. <sup>5</sup>

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah sebuah proses atau jalan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Pendidikan, yang mana data yang telah didapatkan tersebut akan dijadikan sebagai bagian-bagian perumusan kebijakan Pendidikan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Analisis kebijakan ini sesungguhnya tidak hanya berperan dalam menganalisis data atau informasi Pendidikan saja, melainkan juga membahas segala hal yang masih berhubungan dengan kebijakan, contohnya mulai dari membuat kerangka permasalahan, menganalisisnya, mencari serta mengumpulkan sumber, mencari cara penyelesaian masalah hingga menyampaikan hasil tersebut kepada para penentu hasil keputusan tetang permasalahan kebijakan tersebut. Penyusunan alternatif kebijakan dalam proses analisis kebijakannya dilakukan melalui berbagai macam tahapan, sehingga dibutuhkannya beberapa waktu dalam penyusunannya. <sup>6</sup>

Menurut <sup>7</sup>, guru merupakan pendidik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik agar terbentuk kepribadian utama. Apabila hal ini diintegrasikan dengan pengertian pendidik dalam Undangundang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka tugas utama guru adalah mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya melalui kegiatan mendidik, melatih, mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevalusi peserta didik.

Dalam hal tersebut, ada tiga aspek kepribadian peserta didik yang harus dikembangkan oleh pendidik (guru) yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Elwan La Ode, . ". Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010" (Universitas Gadjah Mada, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Elwan La Ode, "ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI" (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Irwan Ghazali et al., "Analisis Kebijakan Pendiidkan," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2022): 67.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama Di Indonesia: Pergumulan Dan Problema Kebijakan 1948-2011.* (Bantul: Pustaka Nusantara, 2012).

Aspek kognitif meliputi tujuan yang berhubungan dengan kemampuan berfikir, mengethui dan memecahkan masalah. Aspek afektif mencakup tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai (moral dan agama), minat dan apresiasi. Aspek psikomotor meliputi tujuan yang berhubungan keterampilan manual dan motorik.

Sedangkan menurut <sup>8</sup>, pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, 57 pembinaan akhlak mulia, dan meluruskanya. Sementara itu, Islam memposisikan guru dalam posisi yang sangat mulia, karena gurulah yang menyampaikan ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan tersebutlah manuasia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa profesi seorang pendidik (guru) merupakan sebuah tugas mulia yang dilakukan seseorang untuk membentuk aspek kepribadian peserta didik mulai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut haruslah diarahkan sejalan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Namun, dalam perkembanganya, pendidik (guru) bukan hanya bertugas sebagai pembibing dan pen-transfer ilmu pengetahuan dan nilainilai serta moral, akan tetapi juga merupakan fasilitaor, pengolah, dan perencana dari pendidikan. maka tidak heran jika dikatakan bahwa guru adalah ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan.

Saat sekarang ini, pengertian tersebut telah mengalami berbagai perkembangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia pendidikan. seorang guru juga dituntut sebagai profesi. Sejalan dengan hal tersebut, guru juga dituntut untuk memiliki standar-standar kompetensi tertentu agar dapat dinyatakan sebagai guru professional.

## Kebijakan P3K

Guru merupakan sesorang yang mempunyai tugas mentrasfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada murid muridnya.Dalam prespektif masyarakat guru merupakan seseorang yang menjalankan tugas pendidikanya baik di Lembaga formal maupun non formal. Guru honorer yakni guru yang diangkat oleh pemerintah secara resmi untuk mengatasi permasalahan adanya kekurangan guru,dalam pemberian upahnya mereka hanya digaji perjam mata pelajaran bahkan ada yang digaji hanya seikhlasnya serta masih dibawah UMR.

Untuk mengatasi permasalaahan guru honorer di Indonesia yang selama ini kesejahteraanya masih memperhatinkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPPK dengan mebuka formasi Sebanyak 1 juta khusus untuk tenaga didik, tujuan

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hamruni, *Konsep Edutainment Dalam Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

adanya kebijakan PPK ini yakni untuk menaikan standar gaji guru honorer sehingga dengan diterbitkanya kebijakanya ini harapanya permasalahan guru honorer di Indonesia teratasi dan dapat menjadi solusi bagi tenaga honorer untuk mendapatkan haknya dan mendapat kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah sehingga Pemerintah berharap kedepanya kinerja guru menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai proses pembelajran yang diharapkan selain itu dengan adanya PPK Ini dapat mendorong anak muda agar memilik ketertarikan menjadi guru. <sup>9</sup>

Dampak Positif dan Negatif Kebijakan PPPK:

### a. Dampak Positif Kebijakan PPPK

Dengan adanya kebijan PPPK ini membuat guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak karena mereka tidak lagi harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhanya dengan demikian guru dapat lebih fokus pada tugasnya sebagai pendidik sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan masksimal.

## b. Dampak Negative Kebijakan PPK

Selain mempunyai dampak positif kebijakan PPK ini ternyata disisi lain juga memiliki dampak negative yakni dengan adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja ini banyak sekolah swasta yang mengalami kekurangan guru karena guru yang mengikuti dan lulus seleksi PPPK mereka dipindahkan ke sekolah negri Sehingga hal tersebut membuat sekolah sekolah di swasta mengalami kekurangan tenaga didik

Dengan munculnya berbagai permasalahan terkait implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui pertemuan diskusi terbatas yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Januari 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus BMPS tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yakni Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril, yang didampingi oleh Sekretaris Dirjen GTK, Nunuk Suryani. Dalam forum tersebut, BMPS menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta, melalui program seleksi PPPK yang dinilai mampu meningkatkan kepastian status kerja dan kesejahteraan para guru. BMPS juga menyatakan kebanggaannya terhadap guru-guru swasta yang berhasil lolos seleksi PPPK, sebagai bukti bahwa sekolah swasta memiliki mutu pendidikan yang tidak kalah unggul.

<sup>9</sup> Utami, Sherin Dwi. Utami, Lutfi Wahyu. Setiawan, Farid. Lestari, "TERSEJAHTERANYA GURU HONORERDENGAN ADANYA KEBIJAKAN P3K."

Namun demikian, BMPS juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan penempatan guru dan kepala sekolah yang lolos PPPK karena mereka dipindah tugaskan ke sekolah negeri. Hal ini dinilai merugikan sekolah swasta, terutama Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, karena harus kehilangan tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. BMPS menilai bahwa proses mencari pengganti tidaklah mudah, apalagi jika yang dipindahkan adalah kepala sekolah yang memegang peran strategis dalam manajemen pendidikan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas proses pembelajaran dan stabilitas lembaga pendidikan swasta. Oleh karena itu, sebagai solusi, BMPS meminta kepada pemerintah melalui Dirjen GTK agar guru dan kepala sekolah swasta yang lulus seleksi PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran serta mencegah terjadinya kegaduhan di lingkungan pendidikan swasta. <sup>10</sup>

## Kebijakan Guru Penggerak

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 terdapat tujuan pendidikan dimana guru penggerak sebagai usaha mencapai pengajar yang memiliki kompetensi yang baik. Isi yang terkandung dalam undang-undang yang paling krusial, yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran <sup>11</sup>. Pengajar penggerak yang mengetahui model, metode, pendekatan, ataupun seni pembelajaran abad-21 tidak dapat melaksanakan program penggerak. Supaya program guru penggerak dapat mengimplementasikan tantangan pendidikan terutama pada abad-21 sebagai peningkatan kualitas dan kompetensi pengajaran guru.

Tujuan program guru penggerak, yaitu sebagai seorang yang terlatih untuk menjadi contoh bagi guru lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam program guru penggerak diberikan pelatihan yang mencakup pendampingan. Secara umum guru penggerak dilatih untuk mengembangkan pendidikan pancasila sebagai contoh kepada siswa. Syahril (2020) yang mengatakan, sebagai guru penggerak telah menjadi arah perubahan paradigma pendidikan yang lebih maju kepada peserta didik serta konstruksi ekosistem dan model pendidikan yang unggul.

Kemendikbud mengatakan bahwa para penggerak seperti guru penggerak merupakan bentuk dari merdeka belajar. Peran guru penggerak, yaitu membentuk

Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER), Vol. 8, No. 1, 2024

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nuraini Karim Damanik, Avif Ariyanto, and Farid Setiawan, "Kebijakan Penerimaan PPPK Guru Dan Dampak Terhadap Pendidikan Swasta," *Masaliq* 2, no. 3 (2022): 354–360.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> S. Kartadinata, *Isu-Isu Pendidikan: Antara Harapan Dan Kenyataan* (Bandung: UPI Press, 2010).

perubahan pada sekolah melewati perubahan kecil dikelas dengan inovasi dan kreativitas untuk menjawab tantangan perkembangan Pendidikan. <sup>12</sup>

Untuk mewujudkan pendidikan pancasila, guru penggerak di dorong secara aktif dan holistik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menjadi contoh agen perubahan nilai-nilai pancasila <sup>13</sup>. Di samping tugasnya sebagai pengajar, guru penggerak bertugas menjadi pelatih dan penggerak bagi guru yang lain dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara inovatif dan kreatif, serta mampu menjadi panutan dan pembawa perubahan yang baik dalam ekosistem Pendidikan. <sup>14</sup>. Adanya guru penggerak ditunjukkan sebagai implementasi dari merdeka belajar yang melibatkan sekolah dan sumber daya internal ataupu eksternal <sup>15</sup>

### **KESIMPULAN**

Analisis kebijakan pendidikan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang berfungsi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Ini mencakup analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, serta penyampaian hasil analisis kepada pembuat keputusan. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Guru juga bertindak sebagai fasilitator, pengolah, dan perencana pendidikan, menjadikan profesi guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan PPPK ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia dengan memberikan mereka kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dampak positif dari kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan dan fokus guru pada tugas mendidik. Namun, dampak negatifnya adalah kekurangan guru di sekolah swasta karena guru yang lulus seleksi PPPK dipindahkan ke sekolah negeri. BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) mengusulkan agar guru yang lolos PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal mereka untuk menghindari kegaduhan dan menjaga kelancaran proses pembelajaran.

Program guru penggerak bertujuan untuk melatih guru agar menjadi contoh dan penggerak perubahan di sekolah. Guru penggerak dilatih untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa dan mengembangkan pendidikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> H.E. Mulyasa, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jawa Timur: Bumi Aksara, 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> W. Dyas, "Pendidikan Guru," *Jurnal Prints* 2, no. 1 (2021): 123.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> U. K Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, "Prean Guru Penggerak Dala Pendidikan," *Dinamika Pendidikan* 14, no. 2 (2021): 88–89.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Naim. Satriawan, W., Santika, I. D., "Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam," *Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2021): 1–12.

Pancasila. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi pengajaran, serta mendukung implementasi "merdeka belajar". Guru penggerak juga berperan sebagai pelatih bagi guru lain dan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif, kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru, dan program yang mengembangkan kapasitas guru sebagai penggerak perubahan dalam sistem pendidikan.

### **REFERENSI:**

- Damanik, Nuraini Karim, Avif Ariyanto, and Farid Setiawan. "Kebijakan Penerimaan PPPK Guru Dan Dampak Terhadap Pendidikan Swasta." *Masaliq* 2, no. 3 (2022): 354–360.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 5th ed. Boston: Pearson Education, 2012.
- Dyas, W. "Pendidikan Guru." Jurnal Prints 2, no. 1 (2021): 123.
- Ghazali, Irwan, Zakki Teguh Wibawa, Muhammad Lutfi Nur Fauzi, and Syifa Nur Anggraini. "Analisis Kebijakan Pendiidkan." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2022): 67.
- Hamruni. Konsep Edutainment Dalam Pendidikan Islam. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Kartadinata, S. *Isu-Isu Pendidikan: Antara Harapan Dan Kenyataan*. Bandung: UPI Press, 2010.
- Kosim, Muhammad. *Pendidikan Guru Agama Di Indonesia: Pergumulan Dan Problema Kebijakan 1948-2011.* Bantul: Pustaka Nusantara, 2012.
- Mulyasa, H.E. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jawa Timur: Bumi Aksara, 2020.
- La Ode, Muhammad Elwan. . ". Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010." Universitas Gadjah Mada, 2011.
- ———. "ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI" (2020).
- Satriawan, W., Santika, I. D., Naim. "Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam." *Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2021): 1–12.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, U. K. "Prean Guru Penggerak Dala Pendidikan." *Dinamika Pendidikan* 14, no. 2 (2021): 88–89.
- Suhendro, Eko, Muhammad Nurul Mubin, and Anita Saharani. "Evaluating the

Impact of Professional Development on STEAM Education Competency in the Industrial Revolution 5.0 Era." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 9, no. 1` (March 31, 2024): 72–81. https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/8305.

Utami, Sherin Dwi. Utami, Lutfi Wahyu. Setiawan, Farid. Lestari, Salsa Warda. "TERSEJAHTERANYA GURU HONORERDENGAN ADANYA KEBIJAKAN P3K." YASIN; Jurnal Pendidikan dan sosial budaya 3, no. 4 (2023): 689–690.